



## PERAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN DALAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN DI KOTA PALEMBANG

Syahrani Zachra <sup>1</sup> Taufik Akhyar <sup>2</sup> Dumyati <sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: syahraniizahra84@gmail.com, akhyartaufik78@gmail.com, Azza.dum@gmail.com

### Abstract (English)

Street lighting is a crucial element of urban infrastructure that plays a role in improving security, comfort, and the smooth flow of community activities, especially at night. The city of Palembang faces challenges in managing street lighting, such as uneven lamp distribution, suboptimal maintenance, and minimal public participation in reporting damaged streetlights. The Department of Public Housing, Settlement Areas, and Land Affairs (Dinas Perkimtan) is responsible for managing street lighting in Palembang. This study aims to analyze the role of Dinas Perkimtan in street lighting management and identify the obstacles encountered. Using a descriptive qualitative research method, data were collected through observations, in-depth interviews with Dinas Perkimtan officials, and document analysis. The results indicate that Dinas Perkimtan plays a role in planning, organizing, implementing, and supervising street lighting. However, its effectiveness is hindered by constraints, lack of interagency coordination, and minimal public involvement. Therefore, strategies to increase funding, cross-sector coordination, and public

### Article History

*Submitted: 31 Februari 2025*

*Accepted: 2 Maret 2025*

*Published: 3 Maret 2025*

### Key Words

street lighting, government role, Dinas Perkimtan, Palembang City, infrastructure

### Abstrak (Indonesia)

Penerangan jalan merupakan elemen penting dalam infrastruktur perkotaan yang berperan dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat, terutama di malam hari. Kota Palembang mengalami tantangan dalam pengelolaan penerangan jalan, seperti kurangnya distribusi lampu yang merata, pemeliharaan yang tidak optimal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kerusakan lampu jalan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) bertanggung jawab dalam pengelolaan penerangan jalan di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perkimtan dalam pengelolaan penerangan jalan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak Dinas Perkimtan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perkimtan memiliki peran dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penerangan jalan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pelibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan penerangan jalan.

### Sejarah Artikel

*Submitted: 31 Februari 2025*

*Accepted: 2 Maret 2025*

*Published: 3 Maret 2025*

### Kata Kunci

penerangan jalan, peran pemerintah, Dinas Perkimtan, Kota Palembang, infrastruktur

## PENDAHULUAN

Penerangan jalan umum merupakan infrastruktur penting dalam sebuah kota untuk mendukung aktivitas masyarakat, meningkatkan keamanan, dan mengurangi risiko kecelakaan serta tindak kriminalitas. Di Kota Palembang, masih banyak ditemukan titik-titik jalan yang kurang penerangan, terutama di kawasan pinggiran dan jalan-jalan kecil. Masalah ini sering kali





disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pemeliharaan dan pengawasan.

Pemerintah Kota Palembang, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, bertanggung jawab atas pengelolaan penerangan jalan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palembang No. 203/KPTS/DPRKP/2021. Namun, berbagai kendala dalam implementasi kebijakan membuat sistem penerangan jalan masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perkimtan dalam pengelolaan penerangan jalan di Kota Palembang serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi: Peneliti mengamati langsung kondisi penerangan jalan di beberapa titik di Kota Palembang yang mengalami masalah pencahayaan.
2. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Perkimtan serta masyarakat pengguna jalan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan tantangan dalam pengelolaan penerangan jalan.
3. Dokumentasi: Menggunakan sumber sekunder seperti laporan pemerintah, regulasi terkait, serta hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan penerangan jalan di Kota Palembang. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap fasilitas publik, Dinas Perkimtan memiliki tugas utama dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap penerangan jalan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Dinas Perkimtan telah menyusun program kerja yang berfokus pada peningkatan penerangan jalan di berbagai titik di Kota Palembang, terutama pada kawasan yang dinilai memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas tinggi.

Namun, pada kenyataannya, upaya yang dilakukan oleh dinas ini masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak wilayah di Kota Palembang masih mengalami minimnya penerangan jalan, terutama di daerah pinggiran dan beberapa ruas jalan utama yang belum mendapatkan perhatian maksimal.

Selain itu, ditemukan pula bahwa kurangnya koordinasi antara Dinas Perkimtan dengan pihak terkait seperti PLN dan kontraktor menjadi salah satu kendala utama

dalam pengelolaan penerangan jalan. Banyak proyek perbaikan dan pemasangan lampu jalan yang tertunda akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi. Hal ini menyebabkan banyak ruas jalan tetap dalam kondisi gelap dalam waktu yang cukup lama, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan tindakan kriminal di wilayah tersebut.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kerusakan lampu jalan. Masyarakat sering kali tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk melaporkan kerusakan penerangan jalan, sehingga banyak titik gelap yang tidak segera



tertangani. Selain itu, beberapa kasus pencurian dan vandalisme terhadap fasilitas penerangan jalan semakin memperparah kondisi penerangan di Kota Palembang. Beberapa lampu jalan ditemukan dalam kondisi rusak akibat pencurian kabel listrik dan komponen lainnya, sehingga membuat fasilitas ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain tantangan dalam koordinasi dan anggaran, hasil penelitian juga menemukan bahwa proses pemeliharaan penerangan jalan di Kota Palembang masih kurang optimal. Banyak lampu jalan yang rusak dibiarkan dalam kondisi mati selama berbulan-bulan sebelum akhirnya diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh sistem pemantauan yang belum berjalan efektif, di mana tidak ada mekanisme yang terstruktur untuk mendeteksi dan menangani lampu jalan yang mengalami kerusakan secara cepat.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa titik penerangan di ruas jalan utama Kota Palembang, seperti Jalan Pangeran Ratu, Jalan OPI Raya, dan beberapa kawasan di Kecamatan Ilir Barat, dan tanjung barangan mengalami kondisi minim penerangan yang cukup serius. Beberapa wilayah ini bahkan hampir tidak memiliki penerangan sama sekali pada malam hari, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan kriminalitas. Wawancara dengan masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa mereka telah beberapa kali mengajukan keluhan terkait lampu jalan yang mati, tetapi perbaikannya memakan waktu lama atau bahkan tidak mendapat tanggapan dari pihak berwenang.

Selain itu, kurangnya tenaga teknis untuk melakukan perbaikan juga menjadi hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan. Dinas Perkimtan tidak memiliki tim pemeliharaan yang cukup untuk menangani seluruh laporan kerusakan secara cepat dan efektif. Proses perbaikan sering kali bergantung pada pihak ketiga atau kontraktor, yang dalam beberapa kasus mengalami keterlambatan karena masalah administrasi atau kendala logistik.

Di sisi lain, meskipun tantangan dalam pengelolaan penerangan jalan masih banyak, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa inisiatif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penerangan jalan. Salah satunya adalah rencana pemerintah dalam mengadopsi sistem pencahayaan berbasis LED yang lebih hemat energi dan memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan dengan lampu konvensional. Beberapa wilayah di Kota Palembang telah mulai menerapkan sistem ini, meskipun masih dalam tahap awal dan belum mencakup seluruh kota.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga dan melaporkan kondisi penerangan jalan di wilayah mereka. Beberapa kampanye telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya penerangan jalan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam memastikan fasilitas ini tetap berfungsi dengan baik. Namun, efektivitas kampanye ini masih perlu ditingkatkan karena tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Perkimtan memiliki peran yang penting dalam pengelolaan penerangan jalan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar penerangan jalan di Kota Palembang dapat berfungsi secara optimal. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek anggaran, koordinasi, pemeliharaan, serta partisipasi masyarakat, masalah minimnya penerangan jalan di beberapa wilayah akan terus berlanjut dan berpotensi menghambat kenyamanan serta keselamatan masyarakat dalam beraktivitas, terutama pada malam hari.

Dengan adanya temuan ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem



penerangan jalan, termasuk peningkatan jumlah tenaga teknis, perbaikan sistem pelaporan kerusakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta percepatan adopsi teknologi pencahayaan yang lebih efisien. Langkah-langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa penerangan jalan di Kota Palembang dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penerangan jalan di Kota Palembang masih menghadapi berbagai kendala yang harus segera ditangani. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas program penerangan jalan. Anggaran yang ada tidak cukup untuk melakukan perawatan dan pemasangan lampu di seluruh titik yang membutuhkan, sehingga banyak daerah yang masih gelap dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan serta tindak kriminalitas.

Koordinasi yang kurang baik antara Dinas Perkimtan dan pihak terkait juga menjadi penyebab utama dari lambatnya perbaikan lampu jalan. Komunikasi yang tidak efektif antara dinas, PLN, dan kontraktor menyebabkan banyak program penerangan jalan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih baik agar perencanaan dan pelaksanaan proyek penerangan jalan dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Masyarakat sering kali kurang peduli terhadap kondisi penerangan jalan di sekitar mereka dan tidak melaporkan kerusakan yang terjadi.

Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai mekanisme pelaporan atau karena ketidakpercayaan bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih aktif dalam melaporkan kerusakan lampu jalan melalui sistem pengaduan yang lebih mudah diakses. Pencurian dan vandalisme terhadap fasilitas penerangan jalan juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Banyak kasus pencurian kabel dan komponen lampu jalan yang menyebabkan penerangan di beberapa ruas jalan menjadi tidak berfungsi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku vandalisme serta pencurian fasilitas umum. Pemasangan kamera pengawas atau patroli keamanan di area rawan juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi kasus pencurian ini.

Salah satu langkah inovatif yang dapat diterapkan dalam pengelolaan penerangan jalan adalah pemanfaatan teknologi *smart lighting*. Dengan menggunakan sistem pencahayaan berbasis LED dan sensor otomatis, penerangan jalan dapat lebih hemat energi dan lebih mudah dipantau. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk memantau kondisi lampu secara real-time dan melakukan perbaikan lebih cepat jika terjadi kerusakan. Implementasi *smart lighting* di beberapa kota besar telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan penerangan jalan serta mengurangi biaya operasional.

Secara keseluruhan, pengelolaan penerangan jalan di Kota Palembang masih perlu banyak perbaikan. Meskipun Dinas Perkimtan telah berupaya menjalankan tugasnya, masih banyak kendala yang menghambat efektivitas program penerangan jalan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif, mulai dari perbaikan sistem koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi yang lebih modern agar penerangan jalan di Kota Palembang dapat lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa



pengelolaan penerangan jalan di Kota Palembang masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek administratif, finansial, serta sosial. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penerangan jalan oleh Dinas Perkimtan.

Selain itu, pengelolaan penerangan jalan juga membutuhkan peningkatan dalam sistem koordinasi antara Dinas Perkimtan, PLN, serta kontraktor yang bertanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan. Dalam banyak kasus, keterlambatan dalam perbaikan lampu jalan terjadi karena kurangnya komunikasi yang efektif antara instansi terkait. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme koordinasi yang lebih sistematis, seperti pembentukan satuan tugas khusus yang bertanggung jawab dalam menangani masalah penerangan jalan. Satuan tugas ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah, penyedia layanan listrik, serta kontraktor pelaksana, sehingga setiap laporan kerusakan dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penerangan jalan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan kerusakan lampu jalan masih sangat rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses, seperti aplikasi berbasis digital atau layanan pengaduan cepat yang dapat diakses melalui telepon seluler. Pemerintah daerah dapat meniru sistem pelaporan di beberapa kota besar lain yang telah menerapkan teknologi smart reporting, di mana warga dapat langsung melaporkan titik lampu jalan yang rusak melalui aplikasi, dan sistem tersebut akan langsung menghubungkannya dengan pihak yang bertanggung jawab untuk perbaikan.

Selain faktor administratif dan sosial, permasalahan pencurian dan vandalisme terhadap fasilitas penerangan jalan juga menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pencurian kabel listrik serta perusakan komponen lampu jalan menyebabkan banyak titik penerangan yang seharusnya berfungsi menjadi tidak bisa digunakan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat menerapkan strategi keamanan yang lebih ketat, seperti pemasangan kamera pengawas di titik-titik rawan serta peningkatan patroli oleh aparat keamanan di lokasi-lokasi yang sering mengalami kasus pencurian. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka turut serta dalam menjaga fasilitas umum dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencurian atau vandalisme lampu jalan.

Dari sisi teknologi, penggunaan smart lighting menjadi solusi yang semakin banyak diterapkan di berbagai kota untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerangan jalan. Lampu dengan sensor otomatis yang dapat menyesuaikan tingkat pencahayaan berdasarkan kebutuhan di lokasi tertentu dapat mengurangi konsumsi energi sekaligus memperpanjang umur lampu. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemantauan jarak jauh terhadap kondisi lampu jalan, sehingga jika terjadi kerusakan, perbaikan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

Pemerintah Kota Palembang dapat mulai menerapkan sistem ini secara bertahap, dimulai dari ruas-ruas jalan utama dan daerah dengan tingkat mobilitas tinggi.

Selain implementasi teknologi, pemilihan jenis lampu jalan juga harus menjadi perhatian dalam perencanaan penerangan jalan ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa lampu yang dipasang memiliki daya pencahayaan yang rendah dan tidak sesuai dengan standar pencahayaan jalan yang ideal. Oleh karena itu, Dinas Perkimtan harus memastikan bahwa setiap



lampu yang dipasang telah memenuhi standar nasional untuk pencahayaan jalan umum. Penggunaan lampu LED dengan tingkat pencahayaan lebih baik dan konsumsi energi lebih rendah dapat menjadi pilihan utama dalam proyek penerangan jalan ke depan.

Secara keseluruhan, pengelolaan penerangan jalan di Kota Palembang masih membutuhkan perbaikan di berbagai aspek. Lemahnya koordinasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta maraknya pencurian dan vandalisme menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Dengan menerapkan strategi yang lebih inovatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan sistem koordinasi, penerapan teknologi smart lighting, serta edukasi kepada masyarakat, diharapkan masalah penerangan jalan dapat diselesaikan secara bertahap. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas penerangan jalan di Kota Palembang, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan keselamatan, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Pengelolaan penerangan jalan di Kota Palembang oleh Dinas Perkimtan masih menghadapi berbagai tantangan, kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya partisipasi masyarakat, serta maraknya pencurian dan vandalisme. Akibatnya, banyak ruas jalan yang masih minim penerangan, meningkatkan risiko kecelakaan dan kriminalitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan anggaran, koordinasi yang lebih baik, partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan kerusakan, serta penerapan teknologi smart lighting agar pengelolaan penerangan jalan lebih efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, penerangan jalan di Kota Palembang dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, A. F., Moch. Dhofir, & Hadi, S. (2014). Analisis peningkatan efisiensi penerangan jalan umum (pju) di kabupaten jember. *Jurnal Mahasiswa Teub*, 2(1),1–7.
- Badan Standarisasi Nasional, (2003), “SNI 6967 Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik Jalan”, Perumahan, Bandung:BSN.
- Badan Standarisasi Nasional, (2008), “SNI 7391 Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan”, Jakarta:BSN. Direktorat Jenderal Bina Marga, (1991), “Spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan”, Jakarta.
- Kuncoro, S., Kasymir, E., Ridwan, A., Nurrohman, H. Z., Duta, A. R., Sihombing, N. P. A. P., & Gunawan, S. (2023). Membangun Sistem Penerangan Jalan Umum Menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts). *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 142–147. <https://doi.org/10.23960/buguh.v3n2.1531>
- Nur, L. T., Y, Y., & Rahman, A. (2022). Peran pemerintah daerah dalam penerangan jalan umum menurut peraturan menteri perhubungan nomor 27 Tahun 2018 tentang alat penerangan jalan (studi kasus di kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(1), 67–75. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6565>
- Putri, T. W. O., Senen, A., & Simamora, Y. (2019). Pemanfaatan Energi Surya untuk Penerangan Jalan & Fasilitas Umum di Desa Sukarame Kab. Lebak Banten. *Terang*, 1(2), 128–136. <https://doi.org/10.33322/terang.v1i2.369>
- Rachmawati, I. (n.d.). ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN DI KOTA SUKABUMI. 103–109.
- Rudini, R., Priatna, E., & Usrah, I. (2021). Analisis Pencahayaan Penerangan Jalan Umum Di Jalan Tol Kabupaten Pangandaran Dan Peluang Hemat Energi. *Journal of Energy and*



Electrical Engineering, 3(1). <https://doi.org/10.37058/jeee.v3i1.2693>

Shamin, N. dan N. A. K. D. (2017). Evaluasi Tingkat Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kota Gorontalo. RADIAL-Jurnal PerADaban SaIns, RekayAsa Dan TeknoLogi Sekolah Tinggi Teknis (RTITEK) Bina Taruna Gorontalo, 7(1), 1–18.

Sukma, I. B., Azis, A., & Pebrianti, I. K. (2021). Perencanaan Lampu Penerangan Jalan Umum Menggunakan Tenaga Surya (Solar Cell) Untuk Alternatif Penerangan Jalan Talang Pete Plaju Darat. TEKNIKA: Jurnal Teknik, 8(2), 140.

<https://doi.org/10.35449/teknika.v8i2.184>

**Aturan dan Undang Undang :**

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palembang NO. 203/KPTS/DPRKP/2021 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1)

**Buku :**

Teori Peran Dasar Dasar Manajemen